

Implementasi Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Bogor

Al Ghozi Masnul Alim

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten

101masnul@gmail.com

ABSTRACT

Implementation of Social Welfare Problem Handling programs for street Children as one of the programs implemented by the local government one of them is the Bogor City Government through social official Bogor City. There is a program for dealing with social welfare problems is to deal with social ills that exist in the city of Bogor, one of them is a street children who become one of the categories people with social welfare problems, through program for dealing with social welfare problem Bogor City Government aims to improve the welfare of the people of the city of Bogor, especially street children in the city of Bogor as role that runs life in the future, wich is the special location of this research. Researchers used a qualitative descriptive method. The selection of research informants used purposive and snowball techniques. This study uses the theory put forward by Van Metter and Van Horn which consists of 6 aspects. The results of this study indicate that the implementation of the Social Welfare Problems (PMKS) program for street children at the Bogor City Social Service is still not effective and well implemented in the running of the rehabilitation program because there are no street children who have participated in the program implemented by the Bogor City Social Service and in its implementation the community has not been directly involved because in its implementation related to the ban on giving money directly to street children in particular it has not been communicated to the public, while in Regional Regulation Number 8 of 2009 article 27 it is clearly stated that it is prohibited to give alms to street children. The researcher's suggestion in the case of street children in Bogor City is to provide an attractive offer regarding the rehabilitation program held by the Bogor City Social Service, then the rehabilitation site which is still owned by the Provincial government to immediately issue permits to be used as a rehabilitation site for the Social Office of the City of Bogor, The standard operating procedures of the Social Service in dealing with street children are improved for better service, increasing synergy with the government and regional apparatus involved in handling cases of street children, socialization and appeals not to give alms to street children who are more creative by placing banners in areas that are crowded with visitors or through social media, psychological guidance and emotional support for street children so they don't go back to the streets.

Keywords: *Bogor city, Implementation, programs for handling people with social welfare problems, street children.*

LATAR BELAKANG

Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia sebagai akar permasalahan ketimpangan sosial, khususnya dalam hal kesejahteraan merupakan sesuatu yang penting untuk bisa diselesaikan oleh pemerintah maupun masyarakat. Undang-Undang No 11 Tahun

2009 tentang Kesejahteraan Sosial secara tegas menerangkan bahwa “semua warga negara tanpa terkecuali memiliki hak untuk menikmati kesejahteraan sosial ” hak warga negara dijamin dan dilindungi oleh negara (kemsos.go.id). Ini menjadikan pembangunan kesejahteraan masyarakat adalah hal prioritas negara. Kemiskinan menjadi akar permasalahan dari kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada November 2020 tercatat jumlah kemiskinan di perkotaan dan pedesaan Indonesia sebesar 26,42 juta, jumlah ini terbilang masih sangat tinggi. Dengan melihat jumlah kemiskinan yang tinggi sudah sepatutnya pemerintah memfokuskan penanganan permasalahan kemiskinan dengan lebih serius, dengan merumuskan kebijakan mengenai pembangunan kesejahteraan sosial guna memperbaiki kualitas hidup masyarakat. (bps.go.id). Pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan dan peningkatan pemberdayaan melalui penerapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan. Pembangunan kesejahteraan ini bisa didapatkan dengan memperbaiki ataupun merumuskan kebijakan dan program yang tepat bagi masyarakat yang kurang beruntung maupun rentan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan peningkatan derajat hidup yang lebih tinggi.

Kebijakan maupun program yang tepat sasaran dengan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat harus di barengi dengan upaya yang di lakukan pemerintah dalam menentukan kebijakan yang tepat, dalam menentukan kebijakan seluruh proses pembentukan agar nantinya bisa diimplementasikan di dalam masyarakat, proses pembentukan kebijakan harus diuraikan secara tepat dengan melakukan penyusunan agenda yang dilakukan untuk menetapkan kebijakan publik yang tepat dan berlaku bagi masyarakat, melakukan tahap formulasi dengan melihat dan menyadari masalah penting dalam lingkungan masyarakat dengan pemerintah sebagai aktor yang bertanggung jawab melegitimasi langsung atas jalannya proses dalam menetapkan kebijakan, tahap implementasi sebagai tahap lanjutan dalam menentukan kebijakan setelah itu dilanjut tahap evaluasi kebijakan di mana dalam tahap ini kebijakan yang sudah diimplementasikan diawasi dan dievaluasi.

Masalah kesejahteraan sosial menjadi salah satu momok yang hingga sampai hari ini

ada dan belum terselesaikan di daerah-daerah yang tinggi penduduk. Masalah kesejahteraan terjadi karena masyarakat atau kelompok masyarakat yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara memadai dan wajar karena miskin, terlantar dan cacat. Untuk mengentaskan kesejahteraan sosial yang ada di dalam masyarakat pemerintah memberikan solusi dengan merumuskan kebijakan mengenai masalah kesejahteraan sosial melalui Permensos No 8 Tahun 2012. Masyarakat yang terdata akan dikelompokkan menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Penyandang masalah kesejahteraan sosial ini terdiri dari beberapa kelompok salah satunya adalah anak jalanan, terdapat 385 anak jalanan yang tercantum dalam renstra dinsos Kota Bogor periode 2019- 2024 (dinsos.kotabogor.go.id), itu artinya ada 385 anak yang kurang mendapatkan perhatian dari segi pendidikan maupun kehidupan yang sejahtera, sehingga hal ini bisa menjadikan ketimpangan dalam kehidupan sosial di Kota Bogor, belum lagi ini menimbulkan kesenjangan sosial yang meliputi kualitas hidup masyarakat dari segi pendidikan dan ekonomi. Oleh karena itu seharusnya pemerintah lebih memperhatikan anak jalanan agar tidak terjadi ketimpangan sosial di masa mendatang.

Upaya penyelesaian masalah kesenjangan sosial ini memang sangat kompleks dalam penyelesaiannya, pemerintah dituntut untuk menyelesaikan masalah mengenai terpenuhinya kebutuhan anak-anak jalanan, baik dari segi pendidikan maupun keberlangsungan hidup karena ini merupakan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu pemerintah sebagai pengambil kebijakan merumuskan program-program yang disusun oleh pemerintah mengenai pengentasan kesenjangan sosial di masyarakat, terlebih mengenai penanganan kesejahteraan anak jalanan. Salah satunya yaitu Program penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) agar masalah seperti anak jalanan yang terlantar bisa diatasi sehingga mampu membawa perubahan di masa depan. Dinas Sosial Kota Bogor sebagai aktor pengambil kebijakan dan pelaksana program penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, yang tercantum dalam Perda Nomor 8 tahun 2009 diatur mengenai penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial, dengan tujuan dari terlaksananya program PMKS ini adalah meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan keberlangsungan hidup dan meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial dengan sasaran pada program penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Bogor anak jalanan (dinsos.kotabogor.go.id), di mana di dalam perda tersebut pemerintah Kota Bogor melaksanakan Program penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi lain yang

terkait, dalam pelaksanaannya Dinas Sosial melakukan program tangkas yang mengikutsertakan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOLPP) dan dinas lain yang terlibat dalam program Tangkas. Dalam peraturan daerah Kota Bogor No 8 Tahun 2009 tercantum mengenai penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama sama dengan masyarakat dengan pendekatan secara menyeluruh agar penanganan anak jalanan dapat diimplementasikan dengan baik. Usaha penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana dalam Perda No 8 tahun 2009 dilakukan melalui beberapa usaha yang sebagaimana usaha yang dimaksud ; a). Usaha preventif b). Usaha represif c). Usaha rehabilitatif d). Usaha perlindungan e). Usaha penunjang.

Tabel 1
PROGRAM ANAK JALANAN

NO	LANGKAH DINAS SOSIAL	PROGRAM
1	Rehabilitatif	- Menjahit - Belajar sanggar seni
2	Preventif	- Sosialisasi anak sekolah untuk tidak memberikan sedekah kepada PMKS - Sosialisasi masyarakat untuk tidak memberikan sedekah kepada PMKS
3	Represif	- Razia bulanan - TANGKAS
4	Perlindungan	- Memberikan bantuan kepada anak dalam masalah hukum
5	Penunjang	- Memberikan bantuan untuk bersekolah

TINJAUAN PUSTAKA

Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino 2006) mendefinisikan "implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan

yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. Terdapat beberapa model implementasi kebijakan yang ada salah satunya menurut Van Metter dan Carl Van Horn. Menurut Van Metter & Carl van Horn (dalam Agustino 2012) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, antara lain :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan, yaitu kinerja implementasi kebijakan publik dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan ditingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.
2. sumber daya, yaitu keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber- sumber dayaitu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber- sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang berlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan publik.
3. Karakteristik Agen Pelaksana, yaitu pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri- ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan

implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen dilibatkan.

4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana, yaitu sikap penerima atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan "dari atas" (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.
5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, yaitu koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksana kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik, yaitu hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter & van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan landasan teori yang fakta, rujukan teori yang relevan yang digunakan untuk menjelaskan variabel yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena pada subjek penelitian secara deskriptif, dalam konteks alamiah, dengan mengumpulkan data secara triangulasi, analisis data bersifat induktif dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah

yang ada dengan peneliti sebagai instrumen kunci karena peneliti yang merencanakan, melaksanakan, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan menyusun laporan penelitian yang dibantu dengan mengembangkan teori. Menurut Sugiyono (2014) menyatakan bahwa metode penelitian merupakan salah satu bagian yang penting dalam suatu bagian yang penting dalam suatu penelitian yang digunakan sebagai landasan atau pedoman dalam melakukan keseluruhan proses penelitian.

Sejalan dengan definisi tersebut, Prasetya Irawan (2006) mendefinisikan metode penelitian yaitu, pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Oleh karena itu peneliti menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan atau pengimplementasian program penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) anak jalanan di Kota Bogor. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena atau objek dengan dilakukan langsung oleh peneliti dengan mengamati, mewawancara narasumber, menganalisis yang berkaitan dengan masalah, dilakukan pengolahan data dan dituangkan dalam bentuk deskripsi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian ini mencakup lebih lanjut dari hasil analisis data yang ditujukan untuk memaparkan lebih jauh lagi terkait indikator dari teori Van Meter dan Van Horn yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, Karakteristik agen pelaksana, Sikap para pelaksana (Disposisi), Komunikasi antar organisasi, lingkungan ekonomi sosial politik. Kemudian untuk mengetahui faktor apa yang menjadikan kebijakan Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) anakjalan dan terlantar bisa dikatakan berhasil dan faktor apa yang bisa menjadikan kebijakan program ini terhambat. Berikut adalah pembahasan dari masing-masing indikator dalam penelitian "Implementasi Program Penanganan Penyandang Masalah kesejahteraan sosial anak jalanan di Dinas Sosial Kota Bogor"

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Dalam implementasi program penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dibutuhkan ukuran dan tujuan kebijakan yang jelas yang dijadikan sebagai acuan dasar yang nantinya bisa dikatakan suatu kebijakan bisa berhasil atau terhambat. Pada temuan lapangan dapat diketahui bahwa Dinas Sosial kota Bogor melalui bagian Rehabilitasi Sosial yang bertugas dalam pelaksanaan Program PMKS anak jalanan berpendapat bahwa tujuan dari adanya program PMKS anak jalanan ini adalah pemerintah hadir dan melayani dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan menekan jumlah anak jalanan yang di jalanan dan mencegah anak-anak usia belajar untuk ke jalanan.

Berdasarkan hasil analisis peneliti pada dimensi ini bagaimana yang diungkapkan oleh Dinas Sosial bagian Rehabilitasi Sosial Kota Bogor sudah sesuai dengan Perda No 8 tahun 2009 tentang penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Standar dan ukuran keberhasilannya kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial terkait penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mengenai tercapainya kehidupan sosial masyarakat yang sejahtera, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dan mencegah peningkatan masalah kesejahteraan sosial. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa terkait dimensi ukuran dan tujuan kebijakan yang telah ditentukan sesuai dengan peraturannya. Pernyataan-pernyataan di atas kemudian diperkuat dengan isi yang ada di dalam perda No 8 Tahun 2009.

Uraian kebijakan dalam Perda No 8 Tahun 2009 menjelaskan mengenai tujuan penyelenggara program kesejahteraan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial dengan diadakannya program penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) didukung dengan pasal 7 yang menjadi tujuan dan ukuran langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan program penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial anak jalanan (PMKS). Langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas sosial berupa langkah usaha preventif, usaha represif, usaha rehabilitatif, perlindungan dan usaha penunjang. Ini merupakan langkah dalam menjalankan implementasi program PMKS untuk mencapai tujuan dari keberhasilan program PMKS.

Sasaran utama dalam Peraturan Daerah No 8 tahun 2009 adalah mengenai penanganan masalah kesejahteraan sosial serta langkah yang dilakukan oleh pemerintah terkait permasalahan kesejahteraan sosial anak jalanan. Anak jalanan sebagai salah satu kategori

PMKS yang menjadi sasaran dari program ini yang artinya fokus dari program penanganan ini adalah menekan jumlah anak jalanan di Kota Bogor dengan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial. Yang menjadi hambatan ukuran dan tujuan kebijakan ini adalah anak jalanan yang menjadi sasaran rehabilitasi dalam program ini tidak ada yang tertarik untuk mengikuti program yang dilaksanakan oleh Dinas sosial, itu dikarenakan anak jalanan lebih memilih mencari uang karena membantu perekonomian keluarga dan ada pula yang malas.

Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan yang menjadi perhatian juga dalam pelaksanaannya adalah sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, sumber daya sarana dan prasarana, sumber daya finansial juga waktu. Sumber daya manusia yang terlibat dalam program penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) anak jalanan adalah pemerintah yaitu Dinas sosial lebih khususnya bagian Rehabsos sebagai pelaksana program PMKS, satuan petugas PMKS (SATGASPMKS) sebagai pelaksana kegiatan penjangkaran anak jalanan dan petugas lapangan, dan masyarakat Kota Bogor yang merupakan bagian eksternal yang terlibat.

Dalam pelaksanaan program ini ada yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya, dari analisis hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui dalam pelaksanaannya sumber daya terkait sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial bisa dikatakan belum cukup baik itu dikarenakan rumah singgah yang dimiliki oleh Dinas Sosial masih berupa bangunan kecil yang hanya menampung 3 orang dan hanya ruangan kosong tidak ada fasilitas seperti barang-barang yang diperlukan oleh penyandang kesejahteraan sosial. Tidak hanya itu, seharusnya Dinas Sosial Kota Bogor harus memiliki balai rehabilitasi untuk menampung anak jalanan yang terjaring razia untuk nantinya dilakukan pendataan dan dilakukan usaha agar mereka tidak kembali ke jalan, balai rehabilitasi yang ada di Kota Bogor masih milik pemerintah Provinsi jadi tidak leluasa untuk dipergunakan. Selain prasarana rumah singgah yang belum memadai, dari hasil analisis wawancara yang dilakukan peneliti juga dapat diketahui terkait prasarana yang digunakan untuk SATGAS PMKS seperti kendaraan patroli dan atribut yang digunakan masih seadanya dan sumber daya manusia pada SATGASPMKS masih kurang untuk mengakomodir wilayah Kota Bogor keseluruhan.

Dari temuan lapangan yang didapat melalui wawancara dapat diketahui bahwa sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial yang terlibat dalam pelaksanaan program penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) anak jalanan ini sudah cukup berkualitas dan mengerti tujuan dan sasaran dari program ini. Berdasarkan hasil analisa di atas dapat diketahui bahwa terkait sumber daya manusia sudah cukup menunjang dalam pelaksanaannya, hanya saja sumber daya sarana dan prasarana yang dimiliki belum cukup baik dalam menunjang keberhasilan implementasi Program penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) anak jalanan di Dinas Sosial Kota Bogor ini.

Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana pada pelaksanaan program PMKS anak jalanan ini yang menjadi *leading sector* dalam program ini adalah Rehabsos Dinas Sosial Kota Bogor selaku pengkoordinasi pelaksanaan penanganan anak jalanan yang masuk dalam kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan melakukan koordinasi dengan anggota terkait pelaksanaan penjangkauan anak jalanan yang berada di jalanan Kota Bogor, memberikan motivasi dan pelatihan kepada anak jalanan agar mereka tidak kembali ke jalanan.

Program yang dilaksanakan harus memiliki acuan atau *standard operating procedure* (SOP) yang menjadi pedoman pelaksanaan program maka peneliti memasukkan SOP dalam analisis implementasi ini. SOP yang menjadi acuan dari implementasi ini berdasarkan dari perda dengan sasaran dan tujuan yang sama. Dalam temuan lapangan pada karakteristik agen pelaksana ini maka dapat diketahui bagaimana karakteristik agen pelaksana pada program ini memiliki tugas dan fungsi masing-masing, mulai dari koordinasi dengan anggota internal rehabsos, koordinasi dengan pemerintah pusat dan kota dalam memberikan dukungan dana, dan instansi yang terlibat dengan program yang mendukung penanganan anak jalanan. Lalu mengenai SOP sebagai standar pelayanan yang dilakukan yang sudah cukup baik dan menjabarkan prinsip dasar dari penyelenggaraan program yang dijalankan.

Sikap atau Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana

Untuk sikap para pelaksana, peneliti mencari informasi tentang pemahaman mengenai program penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial anak jalanan kepada para *stakeholder*. Berdasarkan temuan lapangan yang peneliti dapatkan pemahaman instansi

terkait program penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial anak jalanan mengungkapkan bahwa program ini merupakan langkah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan.

Dapat disimpulkan dari hasil analisis di atas bahwa *implementor* dan *stakeholder* memahami program ini harus terlaksana dengan baik, dalam dukungan terkait pelaksanaan program ini pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kota Bogor memberikan dukungan karena program PMKS anak jalanan ini bisa meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang lebih baik.

Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi antar organisasi merupakan langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan program kebijakan. Karena komunikasi menjadi langkah yang penting karena tanpa komunikasi dan koordinasi antar organisasi program tidak akan bisa berjalan dengan optimal. Komunikasi yang dijalankan oleh pelaksana program berjalan dengan cukup baik dan teratur, komunikasi yang berjalan di dalam instansi pelaksana berjalan dengan baik seperti dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dikomunikasikan dan koordinasikan oleh kepala bidang Rehabsos.

Komunikasi dan koordinasi yang dijalankan bersama instansi lain juga berjalan dengan lancar dan terstruktur karena berjalan dari arahan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bersama dengan *stakeholder* terkait. Koordinasi dengan perangkat dinas yang terlibat dibangun dengan tujuan yang jelas dengan kebutuhan program. Bekerja sama dengan instansi lain seperti SATPOL PP dan DISHUB Kota Bogor dalam penjangkaran anak jalanan yang dilakukan rutin setiap hari. Hanya saja berdasarkan analisis wawancara yang dilakukan peneliti, komunikasi terkait informasi kepada masyarakat yang berada di wilayah Kota Bogor mengenai larangan untuk memberikan sedekah berupa uang atau barang lain kepada anak jalanan atau pengemis belum masif dijalankan oleh pelaksana, padahal tertera dalam Perda No 8 Tahun 2009 pasal 27 ayat 3 terkait larangan tersebut.

Lingkungan Ekonomi Sosial Politik

Kondisi lingkungan eksternal ekonomi sosial dan politik dalam pelaksanaan program kebijakan sangat mempengaruhi selain dari permasalahan internal organisasi. Peneliti melihat kondisi lingkungan di Kota Bogor sedikit menghambat keberhasilan implementasi

kebijakan karena memang Kota Bogor merupakan kota yang dijuluki dengan kota di dalam taman, Kota Bogor dengan kondisi sosial sebagai kota yang sering di kunjungi wisatawan atau kota wisata menjadikan Kota Bogor menjadi ramai wisatawan yang akhirnya mengundang pengemis atau anak-anak di bawah umur mengais rezeki di jalanan Kota Bogor. Peneliti melihat kondisi sosial di Kota Bogor sedikit menghambat keberhasilan implementasi kebijakan karena memang sifat ramah tamah masyarakat yang berada di kota Bogor yang suka memberi sedekah uang ataupun barang lain yang membuat mereka tumbuh berkembang dan bertambah dengan nyaman di Kota Bogor.

Peneliti melihat kondisi ekonomi di Kota Bogor sedikit menghambat keberhasilan implementasi kebijakan karena mereka yang akhirnya ke jalanan untuk mencari uang dengan meninggalkan sekolah mereka adalah karena mereka yang memang kurang mampu untuk menjalankan pendidikan karena keterbatasan biaya. Peneliti melihat kondisi politik di Kota Bogor sejauh dilaksanakannya program PMKS anak jalanan sejauh ini permasalahan yang ada di dalam pelaksanaannya masih dapat diselesaikan dengan baik oleh pelaksana program.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, setelah melalui pengamatan peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam proses Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Bogor khususnya pada penanganan anak jalanan di Kota Bogor dengan menggunakan teori implementasi Van Metter Van Horn dan dengan komunikasi dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait sudah berjalan dengan baik dan dengan dukungan penuh dari pemerintah. Aspek-aspek yang sudah dijelaskan menjadi penunjang dalam mewujudkan program ini. *Pertama*, Ukuran dan tujuan kebijakan, yaitu Ukuran dan tujuan dari program penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh dinas sosial Kota Bogor dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang sudah diterapkan. Hanya saja anak jalanan yang terjaring razia oleh pihak dinas sosial tidak ada yang mengikuti program rehabilitasi yang diadakan oleh Dinas Sosial Kota Bogor. *Kedua*, Sumber daya, yaitu Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial dalam penanganan PMKS terukur dan tepat tanggap dengan sumber daya yang dimiliki, bagaimana sumber daya

manusia yang tepat pada bagian masing-masing dengan kualitas yang memadai, hanya saja kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh petugas patroli yang bertugas memiliki jumlah 12 orang dan dibagi menjadi tiga regu patrol, dan dalam melaksanakan tugas masih kekurangan sumber daya manusia. Sumber daya sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial dalam penunjang implementasi program PMKS masih belum memadai, seperti rumah singgah sebagai tempat menampung untuk dijadikan tempat anak jalanan ataupun PMKS lain sebagai hunian sementara dan pusat rehabilitasi yang belum dimiliki oleh Dinas sosial Kota Bogor, sarana prasarana yang diperuntukkan untuk Satgas PMKS yang bertugas melakukan patroli untuk menyisir PMKS anak jalanan Kota Bogor seperti kendaraan patroli dan alat-alat penunjang yang masih seadanya pun menjadi hambatan dalam pelaksanaan yang terjadi di lapangan.

Ketiga, Karakteristik agen pelaksana, yaitu Dinas sosial Kota Bogor khususnya bagian rehabilitasi sosial sebagai pelaksana program PMKS sebagai *leading sector* sudah menjalankan tugas dengan baik, dengan mengkoordinasikan anggota internal agar berjalan dengan terstruktur dan sistematis dibantu dengan acuan SOP dalam pelaksanaan kegiatan implementasi program PMKS. *Keempat*, Sikap atau kecenderungan (Disposisi) para pelaksana, yaitu pemahaman mengenai program PMKS anak jalanan ini sepenuhnya sudah dipahami oleh *implementor* dan juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat maupun daerah. Hanya saja hambatan terkait sinergitas dengan dinas atau instansi yang terlibat dalam penanganan kasus yang termasuk dalam kategori PMKS salah satunya anak jalanan. *Kelima*, Komunikasi antar organisasi, yaitu komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dengan instansi yang terlibat dalam pelaksanaan program PMKS anak jalanan sudah berjalan dengan baik dengan dilakukannya kerja sama dalam operasi razia PMKS di wilayah Kota Bogor. Hanya saja komunikasi berupa himbauan atau sosialisasi kepada masyarakat Wilayah Kota Bogor mengenai larangan memberikan sedekah kepada anak jalanan belum dilakukan secara optimal. *Keenam*, Lingkungan ekonomi, sosial & politik, yaitu Kondisi ekonomi anak jalanan yang turun dan mencari uang ke jalanan karena kondisi ekonomi mereka yang terbatas sehingga mereka terpaksa berada di jalanan mencari uang dan bahkan berhenti sekolah karena orang tua tidak memiliki biaya. Kondisi sosial anak jalanan yang memilih untuk keluar rumah dan hidup di jalanan itu dikarenakan anak-anak yang masih butuh perhatian dan kasih sayang orang tua, mereka tidak mendapatkan semua itu di rumah karena keluarga yang sudah tidak harmonis lagi.

REFERENSI

- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arman, L (2017). Implementasi Penanganan Anak Jalanan di Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kampung anak negri Kota Surabaya. *Doctoral Thesis, 1- 11*.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. yogyakarta: GajahMada University Press.
- Eko, P. (2015). Implementasi Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Sungai Apit tahun 2011. *Jom Fisip VOL 2 No 2, 1 – 8*.
- Irawan, P. (2006). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: DIA Fisip UI.
- Islamy, I. (2000). *Perinsip-Perinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara* : jakarta: Bumi Aksara.
- Johnston, & Zawawi. (2000). *PR Theory and Practice*. Australia: *Allen dan Unwin*
- Joko, w. (2007). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Kriyantono, R. (2012). *Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nugroho, R. D. (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Pamuchita, Y., & Pandjaitan, N. (2010). Konsep Diri Anak Jalanan : Kasus Anak Jalanan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat. *Jurnal trandisiplin sosiologi VOL 4 No 1, 255-272*.
- Sawir, M. (2021). *Ilmu Admnistrisi Dan Analisis Kebijakan Publik Konsepsi dan Praktik*. Sleman: CV Budi Utrama.
- Subarsono A, G. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2004). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Wayne, P. (2005). *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Brenada Media.

Widodo, J. (2018). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.

Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik, Teori & Proses*. Yogyakarta: Pressindo.